

**UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA
YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI
INDONESIA**

TESIS

Oleh :

**YOSEF SITEPU
2302190014**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA
YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI
INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

YOSEF SITEPU

2302190014



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Sitepu
NIM : 2302190014
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul

**“UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA
YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI
INDONESIA”:**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi dari karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batF.

Jakarta, 16 Mei 2025



YOSEF SITEPU
NIM: 2302190014



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN
APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN
KAPAL-KAPAL NIAGA YANG MENGHAMBAT
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Yosef Sitepu
NIM : 2302190014
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Pembimbing I
Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H.
NIP/NIDN : 191691/9990463325

Pembimbing II
Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 141103/0327096504

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Palmada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 191691/0305097105

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN : 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 12 bulan Juni 2025 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia atas nama :

Nama : Yosef Sitepu
NIM : 2302190014
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga Yang Menghambat Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Penguji	Tanda Tangan
--------------	-----------------	--------------

1. Prof.Dr.John Pieris,S.H.,M.S.,M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr.Paltiada Saragi,S.H.,M.H.

Sebagai Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yosef Sitepu

NIM : 2302190014

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA”.**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain, maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 16 Mei 2025



YOSEF SITEPU
NIM: 2302190014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan bimbinganNYA dan tuntunan-NYA dalam kehidupan penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA”.

Dalam penyelesaian tesis ini, Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof.Dr.John Pieris, S.H., M.S.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I Tesis penulis dan selaku Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan waktu, tenaga, saran, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini
5. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II

Tesis penulis dan selaku Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang juga memberikan waktu, saran, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum, Program Magister, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, yang secara tidak langsung membantu seluruh rangkaian aktivitas kegiatan akademik selama perkuliahan.
7. Kolonel Bakamla Tuti Halida, Kolonel Bakamla Waryoto, Mayor Bakamla Afrizal Agung Satria dari Direktorat Litbang Bakamla dan Mayor Bakamla Dicky dari Direktorat Strategi Bakamla, yang telah memberikan waktu dan data untuk kelengkapan penelitian tesis ini.
8. Yang penulis sayangi dan kasihi istri tercinta Bena Mehuli Tarigan, S.Kep. dan anak-anakku Boyke Pernando Eka Saputra, S.H., M.Kn., Billy Suranta Taruna, S.M., dan Briyanta Immanuel, S.M. yang tiada henti dalam memberikan doa, motivasi, semangat serta dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru bagi para pembaca. Akhir kata dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.

Jakarta, 16 Mei 2025



Yosef Sitepu



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
1. Kegunaan Teoritis	16
2. Kegunaan Praktis	16
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	17
1. Kerangka Teori.....	21
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisis Data	28
6. Lokasi Penelitian	28
G. Orisinalitas Penelitian	29
H. Rencana Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Pengertian Kewenangan Aparat Penegak Hukum	32
B. Analisa Teori Hukum dalam Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum	34
C. Analisa Teori Keadilan dalam Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum	36
D. Analisa Teori Kepastian Hukum dalam Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum	40
E. Penegakan Hukum.....	43
BAB III REGULASI HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA DI PERAIRAN INDONESIA	54
A. Regulasi Keamanan Laut dalam Pemeriksaan Kapal Niaga	54
B. Manajemen Keamanan dan Keselamatan Kapal Niaga.....	71
BAB IV KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA DI PERAIRAN INDONESIA	79
A. Analisis Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga	79
1. Kewenangan Bea Cukai	79
2. Kewenangan TNI Angkatan Laut	83
3. Kewenangan Kepolisian	88
4. Kewenangan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai	96
5. Kewenangan Badan Keamanan Laut	105
B. BAKAMLA sebagai Cikal Bakal <i>Coast Guard</i>	114
C. Strategi BAKAMLA Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan	

Penegakan Hukum di Laut	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA	136



UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMERIKSAAN KAPAL-KAPAL NIAGA YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Oleh : Yosef Sitepu
2302190014

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara geostrategi merupakan negara maritim berbentuk kepulauan (*archipelago state*), yang terletak pada posisi silang diantara dua benua dan dua samudera. Posisi ini menjadikan Indonesia berada pada titik strategis dalam perdagangan dan transportasi internasional. Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang solid, seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni *Coast Guard*.

Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, Indonesia memiliki 17 peraturan perundang-undangan nasional dan 13 instansi/lembaga penegak hukum. sehingga pengaturan dan kewenangan aparat maupun kelembagaan terkadang saling tumpang tindih. Kondisi ini disamping membingungkan juga memberatkan pengusaha perkapalan karena setiap saat instansi/lembaga tersebut dapat menghentikan dan memeriksa kapal di tengah laut, hal ini akan mengganggu jadwal operasi kapal, sehingga biaya logistik dan bahan bakar membengkak.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis melakukan studi lapangan dengan memperoleh data primer menyangkut regulasi penegakan hukum di perairan Indonesia, dan menggunakan studi kepustakaan serta menggunakan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya satu sistem keamanan laut terpadu (*Coast Guard*) melalui peran BAKAMLA.

Kata Kunci: Tumpang tindih kewenangan, hukum laut, *Coast Guard*, BAKAMLA.

EFFORT TO OVERCOME OVERLAPPING AUTHORITY OF LAW ENFORCEMENT OFFICIALS IN INSPECTING COMMERCIAL VESSELS THAT HINDER ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

ABSTRACT

By : Yosef Sitepu
2302190014

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a geostrategic maritime state in the form of an *archipelago state*, which is located at the crossroads between two continents and two oceans. This position makes Indonesia at a strategic point in international trade and transportation. As a maritime country, Indonesia does not have a solid law enforcement agency at sea, as in Japan, China, Australia and the United States which already have one one-stop institution, namely *the Coast Guard*.

In law enforcement and security efforts at sea, Indonesia has 17 national laws and regulations and 13 law enforcement agencies/agencies. So that the rules and authority of the apparatus and institutions sometimes overlap. This condition is not only confusing but also burdensome for shipping entrepreneurs because at any time these agencies/institutions can stop and inspect ships in the middle of the sea, this will disrupt the ship's operating schedule, so that logistics and fuel costs swell.

The specification of this study uses a normative legal research method, the author conducted a field study by obtaining primary data regarding law enforcement regulations in Indonesian waters, and used a literature study and using interview techniques. Based on the results of the research, it was concluded that it is necessary to harmonize the legal system and laws and regulations with the formation of an integrated maritime security system (*Coast Guard*) through the role of BAKAMLA.

Keywords: Overlapping authority, law of the sea, *Coast Guard*, BAKAMLA